

IMPLIKASI YURIDIS DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/ 2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Risha Nathasia Sinulingga¹, Taufiq El Rahman²

INTISARI

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab perusahaan pembiayaan konsumen tidak segera mendaftarkan akta jaminan fidusia atas perjanjian kredit kendaraan bermotor, untuk mengetahui pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan konsumen terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai penelitian hukum normatif maka bahan yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. penelitian ini menggunakan konseptual (*conceptual approach*), bersifat *deskriptif* analisis. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen,. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara *analisis kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tidak segera didaftarkannya akta jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, disebabkan oleh tidak diaturnya didalam Undang-undang jaminan fidusia kapan harus didaftarkan akta jaminan fidusia tersebut dan tidak ada sanksi tegas bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan. Dikeluarkannya peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/ 2012 mengenai pendaftaran jaminan fidusia bertujuan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia peraturan menteri keuangan ini juga membantu agar tidak terjadinya penggelapan terhadap biaya pendaftaran jaminan fidusia yang disetor ke negara berupa pendapatan negara bukan pajak. Mengingat UU No. 42 Tahun 1999 banyak mengandung kelemahan-kelemahan antara lain tidak daiturnya kapan jaminan fidusia harus didaftarkan, larangan menarik objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan dan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

Kata Kunci : pendaftaran jaminan fidusia, perusahaan lembaga pembiayaan konsumen.

¹ Komplek Perdagangan Permai 2, Banjarmasin

² Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Yogyakarta

THE IMPLICATIONS OF JURIDICAL ISSUED BY THE MINISTER OF
FINANCIAL DECREE NO. 130 / PMK.010 / 2012 ON REGISTRATION FOR
FIRMS FIDUCIARY ASSURANCE CONSUMER FINANCE INSTITUTIONS
FOR MOTOR VEHICLES WITH CHARGING FIDUCIARY INSURANCE

Risha Nathasia Sinulingga¹ , Taufiq El Rahman²

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what the cause of consumer finance companies do not immediately register the deed of fiduciary on motor vehicle credit agreement, to find out the registration of fiduciary by consumer finance companies related to the issuance of Ministry of Finance No. 130 / PMK.010 / 2012 regarding the registration of assurance fiduciary for finance companies who conduct consumer financing for motor vehicles with charging fiduciary.

This study is a juridical normative research, as a juridical normative research then matters is used consist of primary juridical matter, secondary and tertiary law. This study uses a conceptual (conceptual approach), descriptive analysis. The matter is used in this study was obtained through study of literature to study the document. Then the data are analyzed by qualitative analysis.

Based on the results of this study concluded that no immediate registration of the deed of fiduciary by finance companies, caused by non-regulation in the fiduciary constitution when fiduciary deed assurance must be registered and there is no strict sanctions for finance companies that do not register. Issued the regulation by the ministers of finance No 130 / PMK.010 / 2012 regarding the registration of assurance fiduciary aims to ensure legal certainty for the parties involved in the regulation of fiduciary agreements the minister of finance also helps to avoid the occurrence of embezzlement against fiduciary assurance registration fee paid to the state in the form of income non-tax state. Considering constitution No. 42 year 1999 contains many weaknesses such as not non-regulation when fiduciary deed assurance must be registered, ban fiduciary interesting objects that have not been registered and there are no strict sanctions against finance companies that do not register fiduciary assurance.

Keywords: fiduciary assurance registration, company consumer finance institutions.

¹ Komplek Perdagangan Permai 2, Banjarmasin

² Faculty of Law, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta